

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Jakarta akan dicabut statusnya tidak lagi menjadi ibukota Indonesia. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, status ibu kota negara akan dicabut dari Jakarta (Hutajulu, 2024). Perubahan status ibu kota negara ini diawali oleh pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Januari 2022 mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke salah satu wilayah di Kalimantan Timur yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN (Winata, 2022). Dalam waktu dekat di tahun 2024, ibu kota negara akan resmi berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah dikeluarkannya keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (Hutajulu, 2024).

Pemindahan ibu kota dari Jakarta bukan menjadi suatu hal yang mendadak direncanakan melainkan sudah dari era Presiden Soekarno rencana pemindahan ibukota ini digagas. Ide pemindahan ibu kota ini sudah dicetus pada tanggal 17 Juli 1957 oleh Presiden Soekarno yang berencana dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Harapan Presiden Soekarno dengan ibu kota di Palangkaraya dapat menunjukkan kemampuan Indonesia dalam membangun ibu kota yang modern. Walaupun begitu, ide tersebut tidak terwujud dan berujung menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia (Nainggolan & Ayundari, 2022). Begitu pun di era kepresidenan selanjutnya, wacana pemindahan ibu kota ini berlanjut ke masa Orde Baru hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isu pemindahan ibu kota ini muncul kembali akibat kemacetan dan banjir yang kerap melanda Jakarta.

Perpindahan ibu kota seperti ini bukan lagi menjadi hal yang asing. Beberapa negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota yaitu Nigeria yang berpindah ibu kota dari kota Lagos ke kota Abuja, Pakistan berpindah dari kota

Karachi ke Islamabad, Myanmar berpindah dari kota Yangon ke kota Naypyidaw, hingga Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya dari kota Kuala Lumpur ke kota Putrajaya (Sorongan, 2022). Brazil, salah satu negara yang mirip dengan kasus Jakarta, telah mempraktikkannya terlebih dahulu dengan memindahkan ibukota yang semula di Rio de Janeiro menjadi Brasília pada tahun 1960 (Daily Passport, n.d.). Hal ini dilakukan oleh pemerintahan Brazil karena Rio de Janeiro sudah padat penduduk dan terjadi kemacetan yang menghambat perjalanan ke gedung-gedung administratif di kota tersebut.

Kemacetan pun juga menjadi salah satu penyebab munculnya kembali wacana pemindahan ibu kota pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diikuti dengan isu banjir di Jakarta (Riana & Amirullah, 2019). Menjadi kota metropolitan, pusat bisnis, dan juga pusat pemerintahan, Jakarta seperti memiliki magnet tersendiri dalam menarik pendatang untuk bekerja, bertempat tinggal, hingga berwisata. Hal ini menyebabkan penambahan penduduk yang semakin banyak dan berasosiasi dengan masalah kemacetan serta banjir tersebut.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah melewati beberapa pertimbangan dan kajian yang dilakukan oleh pemerintah. Selain untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang ada di pulau Jawa, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penempatan ibukota baru Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di Kalimantan Timur yaitu merupakan daerah dengan risiko bencana yang minimal, merupakan lokasi yang strategis, memiliki infrastruktur yang relatif lengkap terutama di Samarinda dan Balikpapan, dan tersedianya lahan seluas 180 ribu hektar yang dikuasai pemerintah (Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2019).

Pada akhir 2024, Jakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan karena status tersebut akan beralih ke Ibu Kota Nusantara (IKN) (Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2019). Dengan pindahnya status pusat pemerintahan menandakan bahwa seluruh lokasi gedung pemerintahan baik Istana Negara, Gedung MPR/DPR, hingga kantor seluruh Lembaga Kementerian akan berada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan pusat akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara dalam waktu

dekat. Walaupun begitu, perpindahan ASN ini tidak dilakukan dalam satu waktu, melainkan secara bertahap.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, masing-masing kementerian dan lembaga dapat membagi jabatan dan ASN yang akan dipindahkan sesuai dengan pola yang telah diberikan oleh Kementerian PANRB (Putri, 2024). ASN yang terpilih tersebut harus bersiap jika dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Tindakan ASN dalam berpindah lokasi pekerjaan dan juga tempat tinggal ke Ibu Kota Nusantara dikenal dengan sebutan mobilitas relokasi.

Menurut Martin (1999; dalam Nisak & Rachmawati, 2019), mobilitas relokasi yaitu tindakan mobilitas ke suatu tempat tertentu yang dilakukan individu maupun kelompok dalam jangka waktu yang singkat atau lama. Mobilitas relokasi ini bisa dilakukan karena pekerjaan yang mengharuskan menetap di tempat baru atau bisa juga dilakukan karena pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya dalam jangka waktu pendek. Aparatur Sipil Negara (ASN) di sini turut akan melakukan mobilitas relokasi ke IKN untuk jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan Otto dan Dalbert (2012), kesiapan mobilitas relokasi merupakan sikap individu atau kelompok dalam menghadapi perpindahan ke suatu tempat tertentu maupun kemungkinan untuk berpindah di kedepannya. Seseorang dapat dikatakan siap dalam melakukan suatu perilaku apabila terdapat sikap terhadap perilaku, norma subjektif terhadap perilaku, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Hal ini berkaitan dengan tindakan mobilitas relokasi yang akan dilakukan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dibutuhkan kesiapan dalam diri tiap ASN untuk dapat melakukan mobilitas relokasi dengan optimal dan tidak menimbulkan efek negatif bagi dirinya dan juga lembaga. Kesiapan mobilitas relokasi ini dipengaruhi oleh sikap terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota, yang erat dikaitkan dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian dari mobilitas relokasi ke IKN ini. Menteri PANRB menyampaikan bahwa ASN yang berada dan bersedia di kloter pertama akan mendapatkan insentif berupa tunjangan pionir yaitu tunjangan kepindahan, tunjangan transportasi, dan lainnya yang diberikan kepada ASN

beserta keluarganya yang ikut serta (Rachman, 2024). Dengan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pemerintah, diharapkan ASN memiliki kesiapan untuk berpindah ke Ibu Kota Nusantara.

Norma subjektif terhadap kesiapan mobilitas relokasi yaitu terdapat tekanan sosial dalam menunjukkan kesiapan dalam mobilitas relokasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Apabila kementerian dan lembaga telah membagi-bagi setiap ASN kedalam kloter-kloter yang ditentukan, ASN yang terpilih tersebut harus siap untuk berpindah ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan yang ditentukan. Jika ASN tersebut menolak, ASN tersebut akan mendapatkan tekanan maupun bujukan dari berbagai pihak yang membuat ASN tersebut akan bersedia pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Persepsi kontrol perilaku kesiapan mobilitas relokasi dipengaruhi oleh sumber daya dan kesempatan yang ada untuk menjadi tolak ukur mudah atau sulit melakukan mobilitas relokasi. Pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas di Ibu Kota Nusantara seperti hunian, gedung perkantoran, hingga transportasi yang ramah lingkungan namun sebagian fasilitas tersebut masih dalam proses pembangunan dan perencanaan. Hal ini bisa mempengaruhi ukuran mudah atau sulitnya ASN dalam mobilitas relokasi ke Ibu Kota Nusantara.

Budiman (2018) mengungkapkan bahwa dalam mobilitas relokasi bisa saja timbul persoalan yang disebabkan oleh pekerjaan (*work-related problem*) maupun di luar pekerjaan (*nonwork-related problem*). Persoalan terkait pekerjaan yang mungkin dihadapi individu yaitu seperti adaptasi dengan lingkungan baru dan tanggung jawab baru. Persoalan di luar konteks pekerjaan juga turut dihadapi individu yang mobilitas relokasi seperti keputusan terkait keluarga, tempat tinggal baru, hingga stres sosial emosional. Persiapan terkait mobilitas relokasi ke IKN ini perlu dimatangkan lebih cepat untuk membuat ASN merasa aman dan nyaman berpindah ke IKN. Menurut Budiman (2018) individu yang tidak siap untuk pindah akan berdampak pada kinerja yang menurun, kualitas kerja yang kurang maksimal, bahkan hingga mengajukan pemindahan diri ke tempat lain.

Mobilitas relokasi bisa menjadi salah satu *stressful experience* karena individu tersebut harus keluar dari zona nyaman dan mempersiapkan berbagai macam hal seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dll. Walaupun begitu, mobilitas

relokasi ini bisa tidak menjadi sebuah pengalaman yang *stressful* tergantung dari pengalaman terdahulunya yang mirip maupun dari kepribadiannya. Individu dengan kepribadian yang rentan terhadap stres, merasa khawatir, dan juga takut akan lebih kurang siap menghadapi situasi baru seperti relokasi ke tempat baru. Merasa khawatir, tegang, takut, perubahan suasana hati yang mudah berubah, maupun emosional merupakan bagian dari *trait* kepribadian *neuroticism* (Wade & Travis, 2007).

*Neuroticism* dapat dikatakan sebagai sifat pencemas dengan hadirnya emosi-emosi negatif yang dirasakan (Costa & McCrae, 1995). Berdasarkan penelitian Otto dan Dalbert (2012) yang dilakukan pada pekerja di Jerman, individu akan merasa lebih siap menghadapi relokasi ke kota lain apabila *trait* kepribadian *neuroticism* tersebut tidak mendominasi.

Berbeda dengan penelitian Otto, penelitian yang dilakukan oleh Nisak dan Rachmawati (2019) pada pegawai audit yang berkemungkinan dipindahkan ke luar kota memberikan hasil yang tidak signifikan antara sifat *neuroticism* dengan kesiapan relokasi. Hal ini disebabkan keputusan dipindahkan ke luar kota merupakan bagian dari kebijakan pekerjaan. Sama seperti yang dirasakan oleh pegawai ASN terhadap kebijakan pindah ke IKN, ASN harus bersedia dipindahkan ke seluruh bagian di Indonesia sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Walaupun begitu, IKN merupakan sebuah kota yang baru dan sedang dalam pembangunan yang mana fasilitas, sarana dan prasarana belum lengkap sehingga bisa menjadi salah satu alasan pegawai ASN belum siap untuk dipindahkan ke IKN.

Belum rampungnya infrastruktur utama dan pendukungnya seperti tempat tinggal, rumah sakit, maupun sekolah, menjadi hal yang memberatkan ASN untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Terbiasa dengan fasilitas yang tersedia di Jakarta seperti transportasi umum yang mudah dijangkau, rumah sakit yang tersebar, berbagai macam hunian, hingga sekolah-sekolah dengan akreditasi bagus, membuat pegawai ASN tidak dengan mudah merasa puas dan aman untuk berpindah ke IKN (CNBC Indonesia, 2022). Tidak sedikit ASN yang bahkan mengajukan permohonan mutasi agar tetap menjadi ASN di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dwi & Widyastuti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

keterikatan khusus yang terbentuk antara pegawai ASN di Jakarta dengan Jakarta itu sendiri yang dapat dikatakan sebagai *place attachment*.

*Place attachment* merupakan hubungan yang dimaknai secara emosional dan fungsional oleh individu terhadap suatu tempat/wilayah tertentu (Williams & Vaske, 2003). Hubungan atau keterikatan terhadap suatu tempat dapat terbentuk melalui interaksi dan pengalaman yang terjadi di tempat tersebut (Kyle et al., 2004). Keterikatan terhadap suatu tempat atau wilayah dapat terbentuk apabila tempat tersebut dapat mendukung tujuannya (*place dependence*) dan juga memiliki makna tersendiri bagi individu (*place identity*).

Melalui Survei Teropong yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Oktober 2022, disebutkan bahwa fasilitas Jakarta lebih memadai dibanding dengan IKN yang mana masih dalam pembangunan yang membuat 10,1% responden lebih memilih untuk tetap di Jakarta. Dari hasil survei tersebut, dapat dikatakan Jakarta dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan fasilitasnya. Selain itu, 43,8% masyarakat Jakarta memilih menetap di Jakarta dengan alasan ikut dengan orang tua atau keluarga. Selain itu, 62,2% masyarakat Jakarta memilih untuk menetap di Jakarta selamanya (Gitiyarko, 2023).

Jakarta sudah menjadi tempat dalam melakukan berbagai aktivitas bersama keluarga, teman, maupun pasangan yang memiliki makna tersendiri di tiap individunya. Secara emosional dan fungsional, Jakarta bisa dikatakan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Hal ini yang belum terlihat dari Ibu Kota Nusantara (IKN) karena fasilitasnya yang masih dalam tahap pembangunan. Kesiapan pegawai ASN dalam mobilitas relokasi ke IKN pun bisa saja dipengaruhi dengan adanya ikatan yang terbentuk dengan Jakarta.

Penelitian ini didasari oleh penelitian sebelumnya yaitu pengaruh *personal dispositions* terhadap kesiapan relokasi yang mana menunjukkan sifat *neuroticism* memiliki pengaruh secara negatif terhadap kesiapan relokasi di Jerman dan tidak berpengaruh secara signifikan di Indonesia. Kedua hasil tersebut menarik peneliti untuk melihat apakah *place attachment* dan *trait kepribadian neuroticism* dapat mempengaruhi kesiapan relokasi pegawai ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penelitian ini dilakukan di lingkup pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kementerian/lembaga pusat di Jakarta. Hal tersebut ditentukan

peneliti karena kementerian/lembaga pusat di Jakarta beberapa diantaranya termasuk ke dalam kloter pertama yang relokasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengaruh *place attachment* dan *trait* kepribadian *neuroticism* terhadap kesiapan pegawai ASN dalam menghadapi relokasi ke IKN.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, didapatkan identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Ada dugaan pegawai ASN pemerintahan pusat yang belum siap untuk menghadapi relokasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlihat dari beberapa penolakan atau rasa berat untuk direlokasi ke Ibu Kota Nusantara.
2. Muncul kekhawatiran-kekhawatiran pada pegawai ASN untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Fasilitas di Jakarta yang lebih lengkap dibandingkan dengan IKN yang masih dalam tahap pembangunan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada pengaruh *place attachment* pada Jakarta dan *trait* kepribadian *neuroticism* terhadap kesiapan pegawai ASN dalam menghadapi relokasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembatasan masalah ini dilakukan agar pembahasan mengenai pengaruh *place attachment* pada Jakarta dan *trait* kepribadian *neuroticism* terhadap kesiapan pegawai ASN dalam menghadapi relokasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ini tidak meluas.

## 1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan yaitu “Apakah terdapat pengaruh antara *place attachment*

pada Jakarta dan *trait* kepribadian *neuroticism* dengan kesiapan pegawai ASN dalam menghadapi relokasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN)?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh atau peran *trait* kepribadian *neuroticism* dan *place attachment* terhadap kesiapan relokasi pegawai ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan ilmiah mengenai peran *trait* kepribadian *neuroticism* dan *place attachment* dalam kesiapan relokasi, terutama untuk kesiapan relokasi pegawai ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan ilmiah bagi pemerintah sebelum menyusun rekomendasi proses relokasi pegawai ASN ke Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan aspek kesiapan relokasi dan *place attachment* pegawai ASN tersebut.